



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI ACEH



**PADA MASA RESES PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021 - 2022
08 – 12 AGUSTUS 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (4), Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja.

Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi Nasional bermaksud telah melakukan kunjungan kerja reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021 - 2022 ke Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 12 Agustus 2022.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, kinerja beberapa BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Secara lebih khusus, kunjungan kerja ke Provinsi Aceh ini memiliki beberapa tujuan spesifik antara lain :

1. Mengetahui perkembangan sektor energi termasuk di dalamnya adalah program regasifikasi, pengolahan gas dan pengelolaan sumber migas baru di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui perkembangan sistem kelistrikan di Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi terluar di Indonesia.
3. Mengetahui kondisi serta perkembangan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
4. Mengetahui kondisi pemenuhan komoditas pangan dan perkebunan termasuk pengelolaan pupuk di Provinsi Aceh.
5. Mengetahui perkembangan proyek pembangunan jalan tol di Provinsi Aceh sebagai bagian dari program peningkatan konektivitas nasional.

6. Mengetahui perkembangan ekspansi usaha semen di Provinsi Aceh dan sekitarnya.

C. Objek Kunjungan Kerja

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Reses tersebut, beberapa pihak yang akan terlibat dalam kunjungan spesifik ini antara lain:

1. Beberapa Kementerian/Lembaga terkait antara lain :
 - a. Eselon I Kementerian BUMN
 - b. Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM
 - c. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan seluruh jajaran
2. Beberapa BUMN (Termasuk Anak Perusahaan BUMN) antara lain :
 - a. PT Pertamina (Persero)
 - b. PT Pertamina Gas
 - c. PT Perta Arun Gas
 - d. PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
 - e. PT Pertamina Hulu Rokan
 - f. PT PLN (Persero)
 - g. PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Iskandar Muda
 - h. PT PTPN III (Persero) Holding dan PT PTPN I
 - i. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
 - j. PT Utama Karya (Persero)
 - k. PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 - l. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-189	ARIA BIMA	PIMP. / F.PDIP
2.	A-196	ADISATRYA SURYO SULISTO	F.PDIP
3.	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	F.PDIP
4.	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F.PDIP
5.	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.	F.PDIP
6.	A-274	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA	F.P.GOLKAR
7.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	F.P.GOLKAR
8.	A-290	BUDHY SETIAWAN	F.P.GOLKAR
9.	A-362	Drs. H. NYAT KADIR	F.P.NASDEM
10.	A-361	ZURISTYO FIRMAPATA, S.E., M.M.	F.P.NASDEM
11.	A-353	H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.	F.P.NASDEM

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
12.	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F.PKB
13.	A-16	Drs. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.	F.PKB
14.	A-523	MUSLIM, S.HI., M.M	F.P.DEMOKRAT
15.	A-554	Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Comm., M.Sc	F.P.DEMOKRAT
16.	A-409	RAFLI	F.PKS
17.	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.	F.PKS
18.	A-499	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M	F.PAN
19.	A-472	H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.	F.PPP

II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dibagi menjadi dua sesi. Beberapa informasi yang disampaikan oleh mitra kerja Komisi VI DPR RI pada saat kunjungan kerja reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021/2022 ke Provinsi Aceh secara terperinci sebagai berikut :

A. SESI I

Tanggal Pertemuan	08 Agustus 2022
Lokasi	Ballroom The Hermes Hotel Banda Aceh
Pimpinan Rapat	Aria Bima (Pimpinan Komisi VI DPR RI)
Mitra yang Hadir	<ol style="list-style-type: none">1. Bapak Abdi Mustakim, Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas Kementerian BUMN RI;2. Bapak Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI;3. Bapak Mulyono, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) beserta jajaran;4. Bapak Gamal Imam Santoso, Direktur Utama PT Pertamina Gas beserta jajaran;5. Bapak Faris Aziz, Direktur Sales & Operation PT Perusahaan Gas Negara Tbk. beserta jajaran;6. Bapak R. Bara Ilmarosa, Direktur Utama PT Perta Arun Gas beserta jajaran;7. Bapak Wiko Migantoro, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi beserta jajaran;8. Bapak Muzwir Wiratama, General Manager Zona I PT Pertamina Hulu Rokan beserta jajaran;9. Bapak Putut Andrianto, Executive General Manager Sumatera Bagian Utara, PT Pertamina Patra Niaga;10. Bapak Adi Lumakso, Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) beserta jajaran;11. Bapak Hartanto Wibowo, Direktur Energi Primer PT PLN (Persero);
Tema	Pengembangan sektor energi di Provinsi Aceh dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Sebagai provinsi yang terletak paling barat di Indonesia, Provinsi Aceh memiliki peran yang sangat penting secara geografis. Selain itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa disertai dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Provinsi Aceh memiliki beberapa potensi perekonomian yang dapat dikembangkan mulai dari sektor energi dan pertambangan, pariwisata sampai dengan sektor komoditas termasuk di dalamnya komoditas unggulan seperti kopi, kelapa sawit, kakao dan komoditas lainnya.

Dengan potensi ekonomi yang dimiliki, pada tahun 2021 Provinsi Aceh berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 2,79% di tengah situasi kondisi pandemi Covid-19. Meskipun dinilai tidak sebesar pertumbuhan ekonomi pada saat sebelum pandemi berlangsung, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh tahun 2021 yang bernilai positif menjadi salah satu indikator bahwa pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh telah berjalan dengan baik.

Pemulihan sekaligus pengembangan ekonomi Provinsi Aceh tentu saja dapat dilakukan dengan daya dukung yang baik dari semua sektor, salah satunya sektor energi. Penyediaan energi baik bahan bakar minyak dan gas maupun energi listrik yang memadai serta distribusi yang menyeluruh dan berkualitas dapat memberikan daya dukung yang kuat bagi pergerakan ekonomi di Provinsi Aceh.

Selain sektor energi, UMKM juga menjadi salah satu sektor terpenting yang perlu menjadi perhatian dalam proses pengembangan ekonomi Provinsi Aceh. Sebagai salah satu sektor yang paling terdampak berat oleh pandemic Covid-19, sektor UMKM perlu mendapatkan perhatian dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan dukungan lainnya terhadap para pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing para pelaku UMKM.

Dalam pertemuan, beberapa mitra menyampaikan perkembangan kinerja serta kontribusi perusahaan terhadap sektor energi di Provinsi yang terinci sebagai berikut.

PT Pertamina (Persero) Beserta Anak Usaha

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) beserta anak usaha atau subholding antara lain:

1. Jaringan distribusi Bahan Bakar Minyak dan LPG Pertamina di Provinsi Aceh sebagai berikut:

- SPBU Reguler: 114 Lokasi
- SPBU Non Reguler: 14 Lokasi
- Pertashop: 169 Lokasi
- SPBUN: 16 Lokasi
- BBM Satu Harga: 7 Lokasi
- SPPBE PSO: 7 Lokasi

- SPPBE Non PSO: 4 Lokasi
 - Agen PSO: 76 Lokasi
 - Agen Non PSO: 31 Lokasi
 - Pangkalan: 6279 Lokasi
2. Kuota pertalite di Provinsi Aceh sebesar 421.468 KL dimana dalam periode 01 Januari sampai dengan 31 Juli 2022, realisasi penyaluran pertalite di Provinsi Aceh sebesar 305.743 KL atau sebesar 1.442 KL per hari.
 3. Realisasi penjualan BBM industri di Aceh sampai dengan Juni 2022 sebesar 72.324 KL dimana 5 terbesar pembelinya adalah:
 - a. PT PLN (Persero)
 - b. PT Prima Wiguna Parama / PT Mifa Bersaudara
 - c. PT PON
 - d. PT Pertamina EP
 - e. PT Solusi Bangun Andalas
 4. Sosialisasi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran melalui penggunaan MyPertamina terus dilakukan ke Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Organda, Mahasiswa dan masyarakat umum melalui *booth offline* yang tersedia di 32 SPBU dengan jumlah pendaftar lebih dari 5000 pendaftar.
 5. Terkait dengan pasokan gas oleg PGN, pasokan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara berasal dari regasifikasi LNG dan Gas Pipa. Pasokan gas pipa Pertamina berasal dari PHE NSO dan PEP Pangkalan Susu, sedangkan pasokan gas pipa lainnya berasal dari PGE, Triangle Pase dan Mendco Blok A.
 6. Sektor industri yang dilayani oleh PGN Group (niaga maupun pengangkutan) diantaranya Pupun Iskandar Muda, Jargas Rumah Tangga, Kawasan Industri Kuala Tanjung dan Sei Mangke serta kelistrikan (PLN Belawan).
 7. PT Perta Arun Gas (PAG) didirikan pada tahun 2013 dengan kegiatan bisnis utama yaitu penerimaan dan terminal regasifikasi yang memanfaatkan infrastruktur eks PT Arun NGL yang telah beroperasi lebih daru 40 tahun.
 8. Saat ini gas dari terminal regasifikasi Arun disalurkan kepada konsumen yaitu PLN Belawan serta PLTMG 1 dan 2.
 9. Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi yang berkelanjutan untuk sektor rumah tangga, industry, pupuk dan kelistrikan.
 10. Kepastian alokasi pasokan baik gas pipa maupun LNG diperlukan untuk menjaga reliability penyaluran dan pengembangan pemanfaatan gas di Aceh dan Sumatera Bagian Utara.

PT PLN (Persero)

1. Sistem Kelistrikan Sumatera s.d Juli Normal dengan Daya Mampu Netto sebesar 8.638 MW, Beban Puncak 6.378 MW sehingga terdapat cadangan sebesar 2.260 MW. Sistem Kelistrikan Kalimantan s.d Juli Normal dengan Daya Mampu Netto sebesar 2.784 MW, Beban Puncak 1.650 MW sehingga terdapat cadangan sebesar 1.414 MW. Khusus untuk Aceh dalam kondisi Normal dengan Daya Mampu 669 MW dan Beban Puncak 445 MW sehingga cadangan surplus 224 MW.
2. Rasio Desa Berlistrik (RD) PLN bulan Juni 2022 untuk Regional Sumatera Kalimantan sebesar 95,69% dimana Sumatera sebesar 99,5% dan Kalimantan sebesar 82,32%. Khusus Aceh RD telah mencapai 100%. Sementara untuk Rasio Elektrifikasi (RE) Aceh sebesar 99,96%.
3. Jumlah Listrik Pedesaan yang dikerjakan tahun 2022 adalah sebanyak 358 lokasi, meliputi 193 Desa Baru dan 165 desa lama. Di Sumatera 37 desa baru dan 107 desa lama, di Kalimantan 156 desa baru dan 58 desa lama. Untuk Provinsi Aceh 8 Desa Lama dengan total Potensi 85 Pelanggan.
4. Untuk mencapai 100% desa berlistrik sesuai roadmap tahun 2022 s.d. 2024, jumlah anggaran investasi yang dibutuhkan untuk membangun lisdas di Sumatera dan Kalimantan sebesar Rp 13,45 T. Untuk anggaran yang terbit tahun 2022 sebesar Rp. 0,9 T sedangkan tahun 2023 sebesar 1,8 T.
5. Kendala dalam melayani pelanggan PLN meliputi: Keterbatasan Akses menuju Desa-desa terpencil dan kesadaran masyarakat dalam memberikan izin untuk penebangan/pemangkasan pohon. Saat ini pelayanan pelanggan meningkat seiring dengan implementasi aplikasi PLN Mobile.

Kementerian Koperasi dan UKM

1. Kontribusi UMKM Provinsi Aceh berdasarkan Lapangan Usaha yaitu berada di sektor:
 - a. Industri Pengolahan;
 - b. Pertambangan dan Penggalian;
 - c. Jasa Keuangan dan Asuransi;
 - d. Informasi dan Komunikasi;
 - e. Pengadaan Listrik dan Gas; dan
 - f. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor UKM sebagai berikut :
 - a. Regenerasi dan terbatasnya SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas yang berkakibat pada pengelolaan Koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional;
 - b. Koperasi Simpan Pinjam masih mendominasi jumlah koperasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati;
 - c. Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan sebagai aggregator serta kurang tanggap terhadap perkembangan teknologi dan inovasi.
 - d. Minimnya pengetahuan Usaha Mikro dan Kecil tentang manajemen bisnis yang baik seperti literasi keuangan, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya;
 - e. Sisi produksi masih belum optimal dan seringkali masih bergantung pada pekerja yang belum professional dibidangnya serta desain produk belum berbasis inovasi, pemanfaatan bahan baku yang belum sesuai standar untuk menghasilkan produk yang berkualitas;
 - f. Jumlah produk UMKM yang masih minim menembus pasar global dan sering kali mengalami pemasaran di pasar domestik;
 - g. Minimnya modal usaha UMKM yang belum optimal mengakses kredit Lembaga Keuangan Formal seperti Perbankan;
 - h. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang belum memiliki legalitas usaha dan berbadan hukum/informal.
3. Jumlah koperasi di Aceh sbb:
 - a. Koperasi Produsen : 1.388 Unit
 - b. Koperasi Simpan Pinjam : 192 Unit
 - c. Koperasi Pemasaran : 126 Unit
 - d. Koperasi Jasa : 171 Unit
 - e. Koperasi Konsumen : 2.270 Unit
4. Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 Mencakup Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yaitu:

- a. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
- b. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi
- c. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
- d. Meningkatkan penciptaan peluang start-up
- e. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial

B. SESI II

Tanggal Pertemuan	09 Agustus 2022
Lokasi	Ballroom The Hermes Hotel Banda Aceh
Pimpinan Rapat	Aria Bima (Pimpinan Komisi VI DPR RI)
Mitra yang Hadir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Zuriyati Simbolon, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN RI; 2. Bapak Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding beserta jajaran; 3. Bapak Ahmad Gusmar Harahap, Direktur PT Perkebunan Nusantara I beserta jajaran; 4. Bapak Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta jajaran; 5. Bapak Budi Santoso Syarif, Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda beserta jajaran; 6. Bapak Donny Arsal, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. beserta jajaran; 7. Bapak Novel Arsyad, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., beserta jajaran; 8. Bapak Entus Asnawi Mukhson, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., beserta jajaran; 9. Bapak Koentjoro, Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) beserta jajaran;
Tema	1. Kondisi pemenuhan komoditas pangan dan perkebunan termasuk pengelolaan pupuk di Provinsi Aceh.

	<p>2. Perkembangan proyek pembangunan jalan tol di Provinsi Aceh sebagai bagian dari program peningkatan konektivitas nasional.</p> <p>3. Perkembangan ekspansi usaha semen di Provinsi Aceh dan sekitarnya.</p>
--	--

Dalam pertemuan, beberapa mitra kerja menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema tersebut di atas yang terinci sebagai berikut.

PT Utama Karya

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Utama Karya antara lain:

1. Realisasi pembangunan Jalan Tol di Aceh beserta timeline penyelesaiannya sebagai berikut :

Ruas	Panjang (km)	Progres Lahan	Progres Konstruksi	Target Penyelesaian
SIGLI BANDA ACEH	74	96,8%	90,5%	Operasi Penuh Jun 2022
Seksi 6 : Kutobaro - Simpang Baitussalam	24	97,4%	81,3%	Des 2022
Seksi 5 : Blang Bintang – Kutobaro	6,3	81,7%	90,9%	Des 2022
Seksi 4 : Indrapuri - Blang Bintang	17	97,6%	100%	Telah operasi Juli 2020
Seksi 3 : Jantho - Indrapuri	13,5	99,5%	100%	Telah operasi Feb 2021
Seksi 2 : Seulimum – Jantho	7	100%	100%	Telah operasi Mar 2022
Seksi 1 : Padang Tidji – Seulimum	5	91,4%	79,5%	Jun 2023
LHOKSEUMAWE - SIGLI	134	Tahap Penyelesaian Desain		Rencana Operasi setelah 2024*)
LANGSA - LHOKSEUMAWE	157	Tahap Penyelesaian Desain		Rencana Operasi setelah 2024*)

*) Masih menunggu kepastian skema pengusahaan dan ketersediaan pendanaan dari Pemerintah

2. Sumber pendanaan pembangunan jalan tol di Aceh sebagai berikut :

Ruas	Nilai Investasi	Struktur Pendanaan		Realisasi Pendanaan		Kekurangan Pendanaan	
				Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan
Sigli - Banda Aceh	Rp12.051 Miliar	Ekuitas	Rp12.051 Miliar	Rp5.184 Miliar	PMN TA 2019 : Rp500 Miliar PMN TA 2021 Tahap I : Rp3.092 Miliar PMN TA 2021 Tahap III : Rp1.592 Miliar	Rp6.813 Miliar	Usulan Pengajuan PMN : PMN TA 2022 Tahap I : Rp3.049 Miliar PMN TA 2022 Tahap II : Rp2.830 Miliar PMN TA 2023 : Rp952 Miliar
		Pinjaman	-	-	-	-	-
Lhokseumawe - Sigli	Rp35.141 Miliar	Ekuitas	Rp10.542 Miliar	-	-	Rp10.542 Miliar	Menunggu kepastian skema pengusahaan dan pendanaan oleh Pemerintah
		Pinjaman	Rp24.599 Miliar	-	-	Rp24.599 Miliar	Menunggu kepastian skema pengusahaan dan pendanaan oleh Pemerintah
Langsa - Lhokseumawe	Rp30.190 Miliar	Ekuitas	Rp9.057 Miliar	-	-	Rp9.057 Miliar	Menunggu kepastian skema pengusahaan dan pendanaan oleh Pemerintah
		Pinjaman	Rp21.133 Miliar	-	-	Rp21.133 Miliar	Menunggu kepastian skema pengusahaan dan pendanaan oleh Pemerintah

3. Kendala yang dihadapi terkait dengan pembangunan jalan tol di Aceh sebagai berikut :

Ruas	Permasalahan dan Tantangan	Strategi Penyelesaian
Sigli – Banda Aceh Seksi 5 & 6	Terdapat 1,8 km lahan belum bisa dikonstruksi sehingga Seksi 5 belum bisa tersambung ke Seksi 6	Eksekusi 22 bidang : • 1 Bidang sudah dilakukan eksekusi pengosongan lahan 18 Juli 2022 • 17 Bidang sudah mengambil uang di PN • 4 Bidang proses aanmaning Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya percepatan pelaksanaan eksekusi pengosongan 4 bidang proses aanmaning.
Sigli – Banda Aceh Seksi 1	Untuk penyelesaian seksi 1 berdasarkan Rencana Teknik Akhir diperlukan 70,73 Ha tambahan lahan untuk kekurangan kaki timbunan dan lereng galian serta keperluan relokasi sungai dan jalan eksisting	Daftar Perencanaan Pengadaan Tanah segera diajukan kepada Gubernur Aceh untuk ditindak lanjuti dengan Penerbitan Ijin Lokasi (Penlok)
Lhokseumawe – Sigli	Belum terbitnya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)	Koordinasi dengan pihak terkait untuk penerbitan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
Langsa – Lhokseumawe	Telah dilakukan optimasi pendanaan pengadaan tanah Ruas Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe. Proses kegiatan pengadaan tanah ditunda sesuai dengan surat Dirjen Bina Marga No : KU0207-Db/884 pada 16 Agustus 2021.	Koordinasi dengan pihak terkait untuk tindak lanjut pengadaan lahan Jalan Tol Langsa-Lhokseumawe

PT Pupuk Iskandar Muda

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) antara lain:

1. Kinerja PIM mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir dengan berapa indikator sebagai berikut:
 - a. Penjualan pupuk urea mengalami peningkatan sebesar 90%.
 - b. Penjualan pupuk ammonia mengalami peningkatan sebesar 144%.
 - c. Pendapatan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 22%.
 - d. Profit perusahaan mengalami peningkatan sebesar 81%.
2. PIM mengalami kendala terhadap pasokan gas sebagai sumber energi produksi. Terkait hal tersebut strategi pemenuhan pasokan gas secara jangka pendek antara lain:

- a. PIM saat ini sedang berupaya mengadakan LNG sesuai keekonomian untuk memenuhi kekurangan pasokan gas Pabrik PIM-2 dan pasokan gas untuk operasional Pabrik PIM-1.
 - b. PIM berkoordinasi dengan stakeholder gas : Kementerian ESDM, SKK Migas, BPMA, Pertamina, dan Penjual LNG KKKS.
 - c. Berkoordinasi dengan Medco Blok A untuk meningkatkan produktivitas sumur sesuai volume kontrak.
3. Sementara itu strategi jangka Panjang yang dilakukan terkait dengan pasokan gas sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dengan BPMA dan SKK Migas untuk mengalokasikan gas dari sumber cadangan migas baru di WK Gebang dan Blok Andaman.
 - b. Melakukan studi pengembangan pabrik baru untuk menyerap potensi sumber gas baru.
 - c. Melakukan studi pengembangan pabrik baru berbasis *green energy* (decarbonisasi).

PT Perkebunan Nusantara I

Beberapa hal yang disampaikan oleh PTPN I antara lain:

1. Total asset/demografi yang dimiliki oleh PTPN I antara lain :
 - 6 kebun
 - 3 PKS
 - 1 Anak Perusahaan
 - 1 Perusahaan Patungan
2. Demografi karyawan PTPN I antara lain
 - Total karyawan 4.288 orang
 - Karyawan laki-laki 3.946 orang
 - Karyawan perempuan 342 orang.
3. Salah satu masalah yang dihadapi oleh PTPN I yaitu terkait dengan permasalahan lahan sebagai berikut :
 - a. Adanya penetapan RTRW di Kabupaten/Kota wilayah kerja PTPN I yang berdampak mengurangi luasan areal kelapa sawit PTPN I
 - b. HGU PTPN I semakin berkurang akibat permohonan lahan untuk kepentingan umum, jalan, PSN (jalan tol)
 - c. Tumpang tindihnya HGU PTPN I dengan penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan.

Terkait dengan permasalahan tersebut strategi yang dilakukan oleh PTPN I antara lain:

- a. Melakukan koordinasi pihak pemerintah/instansi terkait untuk melakukan penyesuaian kembali RTRW.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah/instansi terkait untuk lahan pengganti berkenaan dengan nilai ganti rugi lahan.
 - c. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Kehutanan) untuk percepatan pelepasan dari kawasan hutan. (sesuai dengan UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020 Klaster Kehutanan pasal 110 (a))
4. Sementara itu PTPN juga menghadapi permasalahan terkait dengan penegakan hukum yaitu:
- a. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perkebunan belum berlaku, bahkan tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan terkait dengan penggunaan pasal TIPIRING di lapangan.
 - b. Adanya tumpang tindih peraturan perundangan-undangan antara undang-undang perkebunan, qanun perkebunan, PERMA No.2 Tahun 2012 (penyelesaian batasan tipiring dan jumlah denda dalam KUHP).
 - c. Hal tersebut berdampak kepada merajalelanya pencurian yang terjadi di Unit Kerja PTPN I. Tentu saja akan berakibat kepada kerugian perusahaan. Meskipun tidak signifikan, apabila dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Terkait dengan permasalahan tersebut, strategi penyelesaian yang dilakukan oleh PTPN I yaitu melakukan diskusi dan koordinasi dengan aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan & Kehakiman) dan pemerintah (Pemerintah Daerah & Desa) terkait kesepakatan dalam pengamanan lingkungan perkebunan yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Semen Indonesia Group dan PT Semen Indonesia Aceh

Beberapa hal yang disampaikan oleh Semen Indonesia Group dan PT Semen Indonesia Aceh antara lain:

1. PT Semen Indonesia Tbk ("SI") telah membentuk perusahaan patungan bersama PT Samana Citra Agung ("SCA") dengan JVA yang ditandatangani pada 25 Nov 2015, dan dilaksanakan dalam bentuk badan hukum PT Semen Indonesia Aceh ("SIA") untuk membangun pabrik semen dengan kapasitas 3 juta ton semen/tahun.

2. Pelaksanakan persiapan proyek telah dimulai dari akhir tahun 2015, namun perkembangan kondisi makroekonomi (a.l. volatilitas nilai tukar IDR, penurunan pertumbuhan ekonomi global) dan trend industri semen nasional (a.l. oversupply dan kompetisi dari semen ecobrand) menyebabkan kelayakan investasi Proyek SIA menurun.
3. Tambahan investasi, baik oleh SCA (a.l. pemindahan jalan provinsi, pengembalian batas tanah inbrenng), SIA (pembebasan lahan enclaved tambang), maupun oleh SI (a.l. pembangunan pabrik), mengalami kenaikan resiko pengembalian investasi.
4. Salah satu upaya untuk meningkatkan rencana usaha SIA dan melanjutkan proyek adalah skema kemitraan untuk pasar ekspor, di mana mitra dapat membawa pasar, teknologi, maupun pendanaan. Beberapa pihak telah menyampaikan minat awal untuk menjadi mitra di SIA.
5. Salah satu calon mitra telah menyampaikan minatnya untuk melanjutkan kajian pembangunan pabrik ke tahap yang lebih lanjut untuk kebutuhan pengembangan bisnis bersama calon mitra dalam memenuhi kebutuhan clinker pasar ekspor.
6. Salah satu upaya untuk meningkatkan rencana usaha SIA dan melanjutkan proyek adalah skema kemitraan untuk pasar ekspor, di mana mitra dapat membawa pasar, teknologi, maupun pendanaan. Beberapa pihak telah menyampaikan minat awal untuk menjadi mitra di SIA.
7. Beberapa mitra yang tengah dijajagi : Shun Shing Group International Ltd. (SSGIL), YTL, TCC

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada seluruh mitra pada saat pelaksanaan kunjungan kerja reses ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra (Kementerian/Lembaga) atau BUMN yang diundang dalam pertemuan. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara garis besar, seluruh BUMN yang beroperasi di Aceh diminta untuk meningkatkan kontribusinya bagi masyarakat Aceh melalui penyerapan tenaga kerja, transfer knowlegde, pelatihan dan pendampingan.
2. Khusus untuk PT Pertamina (Persero) Beserta Seluruh Anak Usaha
 - a. Perlu dilakukan transfer knowledge kepada putera puteri daerah Aceh dengan memberikan kesempatan pelatihan dan magang di perusahaan-perusahaan miliki Pertamina group.

- b. Perlu perhatian terkait aspek-aspek keamanan sumur-sumur minyak sehingga tidak memakan korban.
 - c. Eksplorasi migas di Aceh dinilai sangat potensial sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pertamina group. Jangan sampai potensi ini hanya dimanfaatkan oleh perusahaan swasta asing.
 - d. Penyaluran BBM bersubsidi khusus bagi nelayan perlu menjadi perhatian dalam rangka mendukung aktivitas nelayan.
 - e. Pasokan gas terhadap Pupuk Iskandar Muda perlu menjadi perhatian dalam rangka mendukung produksi pupuk yang selanjutnya berdampak besar bagi ketahanan pangan.
3. Khusus untuk PT PLN (Persero)
- a. Saat ini masih banyak keluhan pemadaman bergilir yang terjadi di Provinsi Aceh. Hal ini harus menjadi perhatian PLN untuk menyediakan listrik yang berkualitas dengan pasokan yang terjamin.
 - b. PLN didorong untuk meningkatkan jangkauannya ke seluruh pelosok daerah yang terpencil di Provinsi Aceh.
 - c. PLN didorong untuk meningkatkan efektivitas penggunaan PLN Mobile yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Khusus untuk BPKS Sabang dan Pemprov Aceh
- Kawasan Sabang memiliki potensi yang sangat besar dan perlu dikembangkan, salah satunya dengan mendorong keikutsertaan BUMN di bidang transportasi, pariwisata dll. Oleh karena itu, perlu dilakukan RDP antara Komisi VI DPR RI dengan Pemprov Aceh dan BPKS Sabang terkait permasalahan tersebut dengan turut mengundang BUMN-BUMN terkait.

Keterangan :

Catatan dan rekomendasi tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan pada rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi VI DPR RI.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Aceh pada masa Reses Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 19 September 2022
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Aceh

TTD.

ARIA BIMA

A-189

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Aceh Beserta Mitra Kerja



Penyerahan Cenderamata Pada Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Aceh



Sesi Tanya Jawab Oleh Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Aceh



Sesi Tanya Jawab Oleh Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Aceh